

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia mutlak diperlukan. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, pendidikan memiliki posisi strategis, karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.

Mengingat betapa pentingnya pendidikan, maka pendidikan telah diupayakan dalam berbagai bentuk dan jenjang kependidikan, sebagaimana dalam SPN Nomor 02 Tahun 1989 Pasal 12 ayat (1) yaitu jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Dimana salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) N0.20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pasal 8 menyebutkan

bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Sekolah sebagai institusi (lembaga) pendidikan, merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Lebih dari itu, kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan berkualitas. sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa.

Ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, Sebagaimana dikemukakan oleh (Umaedi:2000) *Faktor pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendidikan education production fungtion atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekwen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produk tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan guru dan alat peralatan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya dipenuhi maka mutu pendidikan (output) akan terjadi. Dalam kenyataannya, mutu

pendidikan tidak terjadi. Mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production function terlalu memusatkan pada input dan kurang memperhatikan pada output pendidikan.

Faktor Kedua. penyelenggaraan pendidikan nasional seraca sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan jangan tergantung pada putu dan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan bimbingannya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Faktor ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini kurang optimal. Partisipasi masyarakat selama ini bersipat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan hasil pendidikan pada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan (stakeholder)

Dengan mencermati kondisi tersebut, maka kepala sekolah sebagai manajer pendidikan harus mempunyai kemampuan, kemauan dan keterampilan dalam melaksanakan fungsi manajemen pendidikan. Ada 3 (Tiga) keterampilan yang harus dimiliki oleh manajemen Pendidikan yaitu : (1) keterampilan Konsep, (2) keterampilan untuk bekerja sama, (3) Keterampilan Teknik untuk

menggunakan pengetahuan, metode, teknik dan perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan melibatkan semua personil sekolah, yang dalam prosesnya menuntut komitmen bersama terhadap mutu pendidikan di sekolah. Tumbuhnya komitmen di kalangan personil sekolah melalui kepemimpinan kepala sekolah sebagai Pemimpin pendidikan.

Peranan penting kepala sekolah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 28 tahun 1990 Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut:

"Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana prasarana".

Dalam petunjuk pelaksanaan Kurikulum dipaparkan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dipaparkan sebagai berikut :

Kepala Sekolah bertugas dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan sekolah. kegiatan meliputi teknis dan administrasi pendidikan, Lintas program dan lintas sektoral dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada di sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Juklak Kurikulum 1994)

Ukuran keberhasilan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya adalah dengan mengukur kemampuannya di dalam menciptakan "iklim belajar mengajar" dengan mempengaruhi, mengajak dan memotivasi guru murid dan personil lainnya untuk menjalankan tugas masing-masing dengan baik dan benar. Sehingga

upaya terciptanya iklim belajar mengajar yang kondusif hal ini tidak terlepas dari kapasitas kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. di sekolah. Dalam kaitannya peranan kepala sekolah sebagai seorang pemimpin pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan diharapkan hal-hal sebagaimana menurut Sellis (1994) antara lain:

1. Mempunyai visi atau daya pandang yang jauh dan mendalam dalam tentang mutu yang terpadu bagi lembaganya maupun dirinya.
2. Mempunyai komitmen yang jelas pada proses peningkatan mutu/ kualitas.
3. Mengkomunikasikan peran yang berkaitan dengan mutu.
4. Meyakinkan kebutuhan peserta didik sebagai pusat perhatian kegiatan dan kebijaksanaan lembaga/sekolah.
5. Meyakinkan kepada para pelanggan (siswa. orang tua masyarakat) bahwa terdapat "channel ' cocok untuk menyampaikan harapan dan keinginan.
6. Pemimpin melakukan pengembangan staf.
7. Menjamin stuktur organisasi yang menggambarkan tanggung jawab yang jelas.
8. Mengembangkan komitmen untuk mencoba menghilangkan setiap penghalang, baik yang bersipat organisasi maupun budaya.
9. Mengembangkan mekanisme yang cocok untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Bila dilihat dari pengelolaan sekolah, pada hakikatnya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pembinaan sumber daya yang meliputi manusia, program pendidikan atau sumber belajar, dan fasilitas

(Engkoswara 2000;43). Ketiga kegiatan ini merupakan fungsi pokok Administrasi Pendidikan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sekolah.

Oleh karena itu kepada sekolah hendaknya memiliki visi dan misi kelembagaan, kemampuan konseptual. memiliki keterampilan dan seni dalam hubungan antar manusia, menguasai aspek-aspek substantif dan teknis pekerjaannya, memiliki semangat untuk maju, memiliki semangat untuk mengabdikan serta memiliki karakter yang diterima oleh lingkungannya (Djam'an Satori:1999;5). Seiring dengan pendapat tersebut diatas, untuk mencapai manajemen yang profesional difokuskan kepada manusianya dalam hal ini kepala sekolah selaku manajer pendidikan. Terdapat beberapa landasan dalam mengembangkan manajemen pendidikan profesional yaitu :

1. Manajer pendidikan harus memiliki semangat tinggi.
2. Manajer pendidikan harus mampu mewujudkan diri yang didasari keterkaitan dan keterpaduan (relevansi) dengan tuntutan lingkungan dan IPTEKS.
3. Manajer pendidikan yang mampu bekerjasama dengan profesi lain.
4. Manajer pendidikan yang memiliki etos Kerja yang tinggi.
5. Manajer pendidikan yang mempunyai kejelasan dan kepastian pengembangan karier.
6. Manajer pendidikan yang berjiwa profesional tinggi.
7. Manajer pendidikan kesejahteraan lahir batin.
8. Manajer pendidikan yang mempunyai wawasan masa depan

9. Manajer pendidikan yang mampu melaksanakan fungsi misi dan perannya secara terpadu.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa kepemimpinan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan sangat menentukan kualitas pendidikan dan upaya peningkatan kualitas pendidikan merupakan tugas yang sangat berat.

Dalam perjalanan pembangunan pendidikan konsep otonomi pendidikan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan konsep otonomi daerah menurut UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Melalui otonomi pendidikan diterapkan desentralisasi pendidikan yang juga merupakan suatu konsekuensi mutlak yang tak dapat dihindarkan dari penerapan otonomi. Dengan desentralisasi pendidikan, setiap kabupaten/kota dan sekolah diberikan wewenang dan keleluasaan untuk mengelola pendidikan. Desentralisasi pengelolaan pendidikan menentukan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonomi, yang menempatkan kabupaten kota sebagai sentral desentralisasi. Pergeseran ini berkaitan erat dengan konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Seiring dengan bergulirnya era demokrasi (otonomi) diberlakukan pula Pendidikan Berbasis Luas (*Broad-Based Education*) dan Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*). Artinya pendidikan harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat luas dan atas dukungan partisipasi dari masyarakat / komite sekolah, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pelayanan pendidikan oleh sekolah-sekolah di seluruh tanah air diharapkan mampu mandiri dan professional berdasarkan prinsip-prinsip



manajemen sekolah, di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang profesional dan dukungan oleh komite sekolah sebagai representasi masyarakat di lingkungan sekolah dengan cara ini sekolah diharapkan akan memiliki kemandirian penuh, kreativitas dan tanggung jawab yang tinggi.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pendekatan politik untuk mendesain dan memberikan kekuasaan kepada sekolah untuk secara sinergi memperbaiki sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu. Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah.

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu kepala sekolah dituntut mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif, prakarsa untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Manajemen berbasis sekolah dapat efektif diterapkan jika didukung oleh sistem berbagai kekuasaan (power sharing), antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam pengelolaan sekolah ditata secara rapih. Manajemen Berbasis Sekolah akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi disekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar.

B. Identifikasi Masalah

Efektivitas pengelolaan sekolah diduga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Dikatakan demikian karena kepala sekolah, selaku pimpinan lembaga sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan di sekolah. Dengan kepemimpinannya kepala sekolah seharusnya mampu mempengaruhi, menggerakkan, mengendalikan, dan mengoordinasikan jajarannya dan masyarakat di lingkungan sekolah. Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan sekolah adalah partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan Karena kondisi kebanyakan sekolah yang menghadapi banyak kekurangan dan keterbatasan, antara lain : fasilitas pendidikan, bahan belajar, dana pembangunan gedung, tenaga kependidikan dan rendahnya dana kesejahteraan bagi guru serta peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini penulis batasi pada masalah yang hendak diteliti saja. Variable bebas (independent variable) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah. Sedangkan variable terikatnya (dependent variable) adalah efektivitas pengelolaan sekolah. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kontribusi kepemimpinan kepala sekolah yang berfungsi sebagai sebagai pendidik, manager, administrator dan sebagai supervisor dan komite sekolah berperan sebagai pemberian pertimbangan, pendukung, pengontrol serta mediator antara pemerintah dan masyarakat (variable bebas) terhadap efektivitas pengelolaan sekolah yaitu efek yang dihasilkan oleh suatu kualitas proses



pembelajaran dan pencapaian hasil pendidikan (variable terikat) pada SMPN di Kota Tangerang Provinsi Banten. Meskipun disadari bahwa selain kedua faktor tersebut masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya, sebagaimana dijelaskan dalam identifikasi masalah.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pengelolaan sekolah?
2. Seberapa besar kontribusi peran komite sekolah terhadap efektivitas pengelolaan sekolah?
3. Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama terhadap efektivitas pengelolaan sekolah?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap efektivitas pengelolaan sekolah. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami:

1. Kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pengelolaan sekolah.
2. Kontribusi peran komite sekolah terhadap efektivitas pengelolaan sekolah.
3. Kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama terhadap efektivitas pengelolaan sekolah.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat memberikan analisis ilmiah dan mendalam tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap efektivitas pengelolaan sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara teoretis memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan berkenaan dengan kepemimpinan kepala sekolah (khususnya SMP Negeri) dan peran komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
2. Secara praktis memberikan masukan kepada para kepala sekolah SMP Negeri dan lembaga penyelenggara pendidikan, masyarakat peduli pendidikan serta pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

G. Kerangka Pemikiran

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management), sekolah mendapat kebebasan dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sekolah dengan mengoptimalkan keikutsertaan sumber daya pendidikan. Partisipasi masyarakat, khususnya orang tua peserta didik sangat dibutuhkan dan merupakan persyaratan mutlak bagi pelaksanaan pengelolaan pendidikan. Ini berarti bahwa penyelenggaraan dan pendanaan pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan jika pengelolaan sekolah dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga peserta didik mampu menerima, menyerap, dan menguasai materi-materi pembelajaran.

Namun demikian, melaksanakan pengelolaan yang efektif bukan pekerjaan yang mudah, karena banyak faktor yang menentukannya. Di antara faktor-faktor yang cukup dominan dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan sekolah adalah kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah. Dikatakan demikian karena kepala sekolah menduduki posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah, dan kepala sekolah yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sekolah yang dilaksanakan oleh dewan guru. Namun demikian, efektif tidaknya kepala sekolah dalam mewujudkan pengelolaan sekolah bergantung pada sejauhmana kemampuannya memimpin sekolah. Sebab tidak semuanya kepala sekolah memiliki kepemimpinan yang efektif dalam mengelola sekolahnya, termasuk dalam mengelola pengelolaan sekolah. Jadi bisa saja, misalnya, kepala sekolah yang justru menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan sekolah, karena dia tidak memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, kondisi dan lingkungan sekolah.

Model kepemimpinan yang demokratis untuk sementara dianggap sebagai model yang kondusif bagi terwujudnya efektivitas pengelolaan di sekolah, sedangkan model kepemimpinan yang otoriter dan kepemimpinan yang bebas dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang kurang mendukung bagi terwujudnya efektivitas pengelolaan di sekolah. Sebagai nama halnya kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah (orang tua peserta didik,

tokoh masyarakat, ilmuwan, dan masyarakat umum di lingkungan sekolah) juga sangat berpengaruh bagi terwujudnya efektivitas pengelolaan di sekolah, sebab sampai saat ini permasalahan yang dapat menghambat pengelolaan sekolah adalah keterbatasan sekolah dalam hal pendanaan operasional sekolah, pasilitas pendidikan, bahan belajar dan rendahnya dana kesejahteraan guru.

Selain itu dalam konteks penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) nomor 20 tahun 2003 masyarakat berhak berperan serta dalam pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya alam penyelenggaraan pendidikan.

Secara teoretis dapat dijelaskan bahwa peran komite sekolah (orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, ilmuwan, dan masyarakat umum di lingkungan sekolah) yang peduli terhadap pendidikan akan menunjang terwujudnya efektivitas pengelolaan di sekolah. Dikatakan demikian karena tingginya kepedulian masyarakat terhadap sekolah direpresentasikan oleh tingginya peran komite sekolah dalam mendukung pengelolaan sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sampai pada pendanaan. Sebaliknya, peran komite sekolah yang rendah atau kurang, tidak akan mendorong terwujudnya efektivitasnya pengelolaan di sekolah.

Jika dianalisis secara terpisah, seolah-olah keduanya merupakan variable terpisah yang dalam prosesnya juga terpisah dalam mempengaruhi mutu pendidikan dan efektivitas pengelolaan di sekolah. Analisis secara persial memang bisa dilakukan demikian. Namun keduanya bisa menjadi variable yang

secara bersama-sama mempengaruhi efektivitas pengelolaan di sekolah. Dikatakan demikian karena penerapan UU No.2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggunakan berbagai sumberdaya pendidikan yang ada secara efektif dan efisien serta partisipasi masyarakat melalui lembaga komite sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepala sekolah dan masyarakat dalam hal ini komite sekolah memiliki hubungan yang sangat erat. Kepala sekolah dalam memimpin sekolah secara efektif sangat terkait dengan fungsi komite sekolah sebagai lembaga pengawasan dan pendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Artinya secara sinergik keduanya memiliki andil yang sangat besar dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan.

Dari logika pembahasan tersebut di atas, maka dapat diduga bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama memiliki hubungan dan komplementer yang positif dengan peningkatan mutu pendidikan dan efektivitas pengelolaan sekolah. Artinya semakin efektif kepemimpinan kepala sekolah, maka semakin tinggi pula peran komite sekolah terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pendidikan.

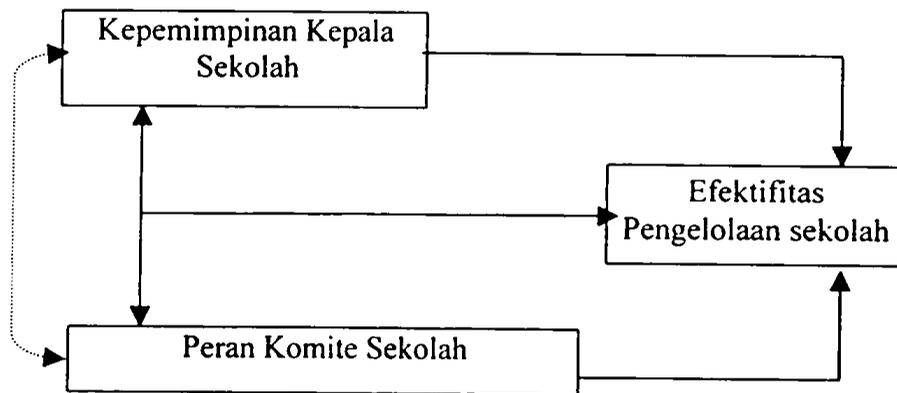
Berdasarkan logika pembahasan diatas dapat dirumuskan dugaan kontribusi antara berbagai variable penelitian berikut ini :

1. Kepemimpinan kepala sekolah sebagai variable bebas (X1) berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan sekolah sebagai variable terikat (Y)

2. Peran komite sekolah sebagai variable bebas (X2) berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan sekolah sebagai variable terikat (Y)
3. Kepemimpinan kepala sekolah sebagai variabel bebas (X1) dan peran komite sekolah sebagai variable bebas (X2) secara bersama-sama berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan sekolah sebagai variable terikat (Y)

KERANGKA PENELITIAN

Gambar 1.1. Hubungan antar variabel



H. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis utama sebagai berikut : “Kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah berkontribusi positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sekolah”.

Selanjutnya, hipotesis utama dijabarkan dalam subhipotesis sebagai berikut:

1. Ada kontribusi positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pengelolaan sekolah.

2. Ada kontribusi positif dan signifikan peran komite sekolah terhadap efektivitas pengelolaan sekolah.
3. Ada kontribusi positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama terhadap efektivitas pengelolaan sekolah.

